

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP TERORISME

Dalam bab ini saya menjelaskan Politik Luar negeri Amerika Serikat terhadap terorisme, dimana meliputi : Karakteristik Dasar politik Luar Negeri AS, Kebijakan umum AS terhadap isu Terorisme, dan Dinamika Politik Luar Negeri AS Terhadap Isu Terorisme.

A. Karakteristik Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan Negara yang selalu aktif berperan dalam percaturan politik internasional karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan sumber daya yang sangat besar, baik kekuatan dalam bidang militer, ekonomi maupun ilmu pengetahuan, dan juga dukungan oleh wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar . politik luar negeri AS memiliki 5 karakteristik utama yang satu sama lainnya memiliki sifat yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Hal ini disebabkan karena satu sama lainnya terjadi secara periodik pada kurun waktu yang lama. Dalam keilmuan, Thomas Kuhn berpendapat bahwa perkembangan disiplin ilmu tidak berjalan secara ajeg. Dalam satu kurun waktu terjadi perkembangan besar-besaran. Hal ini dimaksudkan bahwa sejarah perkembangan konsep-konsep dari

teori teori Hubungan internasional lambat laun akan hilang dan termakan oleh paradig baru. Persepsi terhadap persoalan HI sering mengalami anomaly.¹⁶

Karakteristik politik luar negeri AS yang digunakan sebagai sarana mencapai kepentingan nasional yaitu :

1. Isolasionis

Isolasionis adalah doktrin yang menuntut sebuah Negara agar membatasi hubungannya dengan Negara lain, khususnya hubungan politik hingga ke taraf yang paling minimum.¹⁷ Kebijakan politik luar negeri yang berorientasi isolasionis ini ditanamkan As sejak Negara ini baru lahir oleh George Washington yang pada tahun 1799 menyatakan bahwa *Europe has a set primary interest, which to us have none or a avery remote relation,*¹⁸ maksud dari pernyataan tersebut bahwa AS tidak ikut campur atau menjalin hubungan dekat dengan Eropa walaupun Eropa mempunyai segudang kepentingan, yang salah satunya adalah mengintervensi dan mengekspansi Negara lain.

Politik isolasionis merupakan pilihan para pengambil keputusan di Ad sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-20 sebagai konsekuensi dari sikap tidak ingin AS mencampuri urusan bangsa lain.¹⁹ Sehingga sepanjang periode tahun 1800 hingga 1945 kongres dan presiden As mengambil sikap hati-hati dalam menjalankan politik luar negerinya. Dalam hal ini kongres membatasi

¹⁶ Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, (Jakarta:LP3ES, 1990), Hal 13

¹⁷ Michael A. Riff, Kamus Ideologi Politik Modern, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hal.103

¹⁸ Julius W. Pratt, History of US Foreign Policy (Englewood Cliff, N. J : Prentice Hall Inc.1963)p.80

¹⁹ Bambang Cipto, Politik dan Pemerintahan USA (Diktat Mata Kuliah Politik dan Pemerintahan AS, UMY), hal, 195

kebijakan presiden dalam menjalankan politik luar negerinya agar tidak terlibat jauh ke dalam konflik-konflik di Negara Eropa.²⁰

Pada masa pemerintahan Monroe juga menerapkan sistem “*non colonization*” yang diperkuat dengan Doktrin Monroe pada tahun 1823 yang berisi pernyataan :

Dalam diskusi dimana kepentingan telah berkembang, kesempatan itu telah menyatukan sebuah prinsip dimana meliputi hak dan kepentingan AS bahwa benua As yang merdeka dan bebas telah di akui dan selanjutnya tidak mempertimbangkan untuk menjadi actor bagi kolonisasi yang akan datang dengan kekuatan Eropa.²¹

Meskipun AS tetap pada politik isolasi dengan sikap netralnya, namun di abad 19 Amerika Serikat meluaskan wilayahnya, apalagi pada saat pecahnya perang Dunia I, Amerika Serikat menjual senjata kepada negara-negara sekutu dan memberi kredit sekitar 10 juta Dollar kepada Perancis. Sehingga tindakan AS tersebut tidak netral oleh Jerman. Bahkan di akhir abad 19 terjadi perang antara Spanyol dan Amerika yang diakibatkan adanya pemberontakan oleh koloni Spanyol yakni Kuba. Pada akhirnya AS menduduki Kuba dan mengambil alih koloni Spanyol lainnya yakni Puerto-Rico,-Guam,- dan Filipina dengan-uang-ganti-rugi sebesar 20 juta dollar.²² Setelah itu, strateginya kembali beralih menjadi

²⁰ Loc. Cit

²¹ Loc. Cit

²² Ralp H Gabriel, Nilai-nilai Amerika. Kelestarian dan Perubahan, diterjemahkan oleh Paul Sorono Hargosoewoyo, (Yogyakarta: Gadjah Mada University), hal. 196

politik isolasionisme denganindikasi tidak adanya peran aktif AS di dunia internasional salah satunya dengan tidak menjadi anggota Liga Bangsa Bangsa.

Strategi isolasionis AS sedikit berkurang dengan keterlibatannya memihak sekutu dengan perang melawan Jerman pada tahun 1891-1919. Strategi perang kapal selam yang dicetuskan Jerman merupakan langkah pertama keterlibatan Amerika secara aktif dalam politik Internasional yang agak keluar dari prinsip politik isolasionis yang dijalankan Amerika. Dengan alasan penegakan prinsip moral universal, maka Amerika bersedia untuk ikut aktif dalam Perang Dunia I tersebut. Setelah PD I, AS lebih bersikap isolasionis, hal ini dikarenakan efek yang terjadi pada perang tersebut.

2. Ekspansionis

Ekspansi merupakan salah satu prinsip politik luar negeri AS yang bertolak belakang dengan isolasionis. Perubahan politik luar negeri ini diakibatkan karena situasi dan kondisi yang menjadikan AS harus merubah politik luar negerinya. Pada awalnya AS menerapkan politik isolasi, yang tidak mau ikut campur urusan bangsa lain dan peraturan politik internasional. Lalu kemudian politik itu berubah menjadi negara yang ingin memperluas dan mengembangkan pengaruh dan wilayah ke negara lain, dengan kata lain melakukan ekspansi. Ekspansionisme sendiri sebagai symbol awal pecahnya politik isolasionisme Amerika yang ditandai dengan peran aktif dalam politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan demokrasi barat.

Kegiatan ekspansi AS ini dimulai pada tahun 1869 dengan perkembangan liberal baru yang pada intinya menyarankan agar AS meniru Inggris dengan segala keberhasilannya menjalankan politik kolonialismenya. Amerika Serikat sendiri mampu melakukan kegiatan ekspansi karena keinginan ini didukung dengan keberhasilan dari dalam negerinya membangun kekuatan politik dan ekonomi yang paling dinamis di seluruh dunia yang kemudian bersamaan dengan penyebaran berbagai gagasan reformasi internasional. Namun gagasan reformasi ini yang kemudian berkembang menjadi Imperialisme. Sebab-sebab dari Imperialisme Amerika Serikat adalah :

- a. Amerika Serikat ingin menjadi World Power
- b. Ingin menyamai (militer) politik Negara Eropa
- c. Majunya faktor-faktor industri
- d. Penggunaan kekuatan militer
- e. PBB sebagai kekuatan penjaga perdamaian

Dalam hal inilah AS selalu menerapkan politik Ekspansi ke negara-negara lain terutama negara-negara yang sedang berkembang.

Keterlibatan dengan kekuatan luar ini mulai muncul pada saat terjadi *civil war* antara utara dan selatan. Tindakan ekspansionis pertama adalah pada tahun 1808 dengan menganeksasi kepulauan Hawaii dalam rangka menduduki Filipina melalui perang dengan Spanyol diikuti kemudian mengajukan klaim atas Guam dan Samoa. Dalam ekspansi ke Karibia dikenal dengan istilah Gun Oat Diplomacy. Kemudian pada tahun 1860 dengan membeli Alaska dari Rusia

kemudian berkembang dengan melakukan ekspansionisme ke Kuba, Amerika Latin dan berbagai pulau di Asia.

Namun pada tahun 1937 Presiden Roosevelt melaporkan pada bangsa Amerika bahwa keamanan AS sedang terancam. Setelah pemerintahan Jerman menguasai Denmark, Norwegia, Belanda, Luxemburg, dan kemudian Prancis juga dikuasai, Roosevelt mengatakan bahwa :

Pertahanan militer bagi ekspansi demokratik sekarang bahwa perlu dilakukan di empat benua. Bila pertahanan gagal, segenap penduduk dan sumber daya Eropa, Asia, Afrika dan Australia akan didominasi oleh para penakluk. Ingatlah bahwa jumlah penduduk dan sumber daya keempat benua ini sekian kali lipat lebih besar daripada jumlah keseluruhan penduduk dan sumberdaya dunia barat.²³

Dengan pidato tersebut maka dukungan dari rakyat AS pun didapatkan. Roosevelt juga menambahkan bahwa selain pertimbangan domestic, perdamaian tidak dapat dibeli dengan harga kebebasan negara lain.

3. Netralitas

Netralitas merupakan salah satu prinsip yang juga dianut oleh Amerika Serikat. Politik netral adalah status dimana suatu negara tidak mau ikut andil atau melibatkan diri dalam suatu perang atau menempatkan hak dan kewajiban tertentu yang ditujukan pada negara yang berperang. Hal ini bisa diartikan bahwa AS tidak akan berpihak pada salah satu blok atau negara yang sedang berkonflik. Sikap netral ini mewarnai politik luar negeri AS dalam menghadapi gejolak perang

²³ Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional I, alih bahasa Budiono, (Jakarta : PT. Gramedia), hal 63

Eropa yang sedang berkecamuk pada waktu itu, sehingga sikap ini ditujukan AS kepada Eropa yang dianggapnya tidak pernah berhenti dalam aliansi dan intrik militer. Sehingga AS mengambil sikap bijaksana yaitu dengan sikap netral untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri yang netral ini dipegang sampai menjelang Perang Dunia II dan dinyatakan tiga kali dalam Undang-Undang dasar yang mana salah satunya adalah The Neutrality Act yang diratifikasi oleh congress pada tahun 1937.²⁴

4. Intervensionis

Karakteristik intervensionis ini ditujukan untuk mencegah pengaruh ideology lain yang menurut AS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi khususnya ideology komunis. Dalam hal ini AS tidak segan-segan melakukan intervensi dengan dalih untuk mengamankan prinsip-prinsip demokrasi. Keinginan untuk mengemban misi demokrasi dan kebebasan ini diwujudkan dalam tujuan kebijakan luar negeri namun di sisi lain, hal ini telah mendorong AS untuk cenderung menafsirkan maksud-maksud lawan melalui kaca mata teori aggressor dan tirani.

Menurut Jack C. Plano, intervensi didefinisikan sebagai : *Coercive inference in the affairs, of state of another state or a group of state to effect the internal policies of that state.*²⁵ Ciri dari kegiatan intervensi ini adalah bersifat campur tangan dalam berbagai unsure baik masalah kenegaraan dan masalah dalam negeri maupun internasional. AS melakukan intervensi terhadap negara lain terutama kepada negara-negara berkembang atau negara yang baru merdeka. Baik

²⁴ Harwanto Dahlan, Politik dan Pemerintahan AS, (Yogyakarta : FISIPOL UMY, 1993), hal 182

²⁵ Julius W. Pratt, Op. Cit, p. 80

intervensi yang bersifat terselubung maupun intervensi yang secara terang-terangan dengan mendukung para pemimpin suatu negara untuk mengatur komposisi pemerintahan dan kegiatan kelompok dalam proses politik.

Bila pada masa perang dingin, Amerika mengemukakan tentang containment policy untuk membendung pengaruh dan ideology komunisme maka kemudian ada beberapa ideology tindakan yang diberi nama *enemies of tolerant and democratic society* yakni terorisme, nationalism ekstrem serta organisasi kriminal. Maka pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton munculah istilah *neo containment policy* yang bertujuan untuk membendung pengaruh musuh demokrasi tersebut. Kemampuan ekonomi dan kekuatan militer yang mantap dan stabil dari AS inilah yang menjadikan AS mampu melaksanakan intervensinya terhadap negara lain, sehingga AS semakin populer dalam percaturan politik internasional pada decade pasca perang dingin II.

5. Ambisius

Karakter ambisius ini mendominasi politik luar negeri AS pada akhir abad ke-20, khususnya pasca Perang Dingin II pada tahun 1945 hingga berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990. Sikap ambisi ini bisa dikatakan sebagai politik standar ganda (Double Standard), yang dimaksudkan bahwa AS inkonsisten dengan prinsip yang dianutnya. Sehingga AS menghalalkan segala cara walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi hanya untuk meraih / mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik untuk suatu kepentingan ekonomi maupun kepentingan nasionalnya.

Sikap ambisius AS terlihat pada beberapa isu internasional yang menggunakan prinsip standar ganda dalam melakukan kebijakan politik luar negerinya, sebagai contoh adalah dalam kasus Kuwait jelas AS tidak melakukannya demi prinsip dan nilai demokrasi, karena Kuwait tetap dipimpin oleh seorang monarkis, tetapi lebih pada kepentingan AS pada minyak dan asset Kuwait. Kasus ini adalah salah satu isu internasional yang memperlihatkan adanya ambisi AS dengan politiknya yaitu politik standar ganda. Selain itu contoh lainnya adalah pada sikap dan pernyataan.

B. Kebijakan Umum Amerika Terhadap Isu Terorisme

Politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.²⁶

Amerika Serikat sendiri dalam pelaksanaan politik luar negeri tentunya juga berorientasi pada kepentingan nasional yang di dasarkan pada kondisi obyektif baik di dalam negeri maupun kondisi politik internasional yang berkembang saat

²⁶ Perwita dan Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 47

ini. Bila ditinjau dari segi filsafat politik, politik luar negeri AS tampak unik, di satu sisi politik luar negeri Amerika Serikat dapat berperan untuk melindungi negara lain dengan cara memperluas kepentingan AS di seluruh dunia, di sisi lain AS mempunyai tugas mengubah sistem internasional sedapat mungkin seperti keinginannya yang di dasarkan atas kemauan dan citranya sendiri dan AS menginginkan kedua cara itu dalam politik luar negerinya. Sifat yang dapat dikatakan tidak taat azas itu menyebabkan politik luar negeri AS menunjukkan ciri khas yang bertentangan.

Kendati Amerika Serikat kini muncul sebagai satu-satunya negara adikuasa, namun para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat merasa perlu untuk terus menerus menyesuaikan agenda politik luar negerinya sesuai dengan perubahan sistemik dan situasional yang terjadi di lingkungan eksternal dan internalnya. Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pandangan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal di dunia yang saling membutuhkan dan bergantung dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan berbagai negara di dunia dalam rangka mencapai berbagai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat. Pelaksanaan strategi tersebut terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, Amerika Serikat dapat memanfaatkan sumber daya, seperti perekonomiannya, sekutu-sekutu di bawah kepemimpinan yang tegas dapat menunjang politik luar negerinya. Kekuatan militer yang besar dan diplomasi.

Kebijakan luar negeri AS tampaknya tidak berbeda dengan decade sebelumnya, yaitu kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menghadapi ancaman musuh Amerika Serikat. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menanggapi isu terorisme merupakan usaha Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingan dunia bebas dan ancaman terorisme global yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan global.

Tragedi 11 september 2001 menjadi momentum keabsahan Amerika, peristiwa tersebut menjadi faktor signifikan bagi penguatan hegemoni AS, yang dimanifestasikan dalam bentuk kehadiran dan peran global AS dalam pentas politik Internasional secara lebih dominan. Serangan teroris 11 September memperkuat keyakinan para pemimpin AS bahwa kepentingan keamanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada gilirannya menuntut penguatan hegemoni AS dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional.

C. Dinamika Politik Luar Negeri AS Terhadap Isu Terorisme

Dinamika politik luar negeri Amerika dalam menjalankan kebijakan terhadap isu terorisme, Amerika Serikat menggunakan plat form kebijakan *preemptive* dan *preventive*.²⁷ Kebijakan *preemptive* adalah kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk mengantisipasi secara cepat potensi serangan terorisme. Sedangkan kebijakan *preventive* adalah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang sifatnya tidak terlalu agresif.

²⁷ Scott Moore "The Preemptive and Preventive Use of Force in the Age of Global Terror" //http://www.w3.org/TR. Diakses 15 September 2014

Selanjutnya, kebijakan *preemptive* adalah penerapan strategi menyerang sebelum diserang. Melalui doktrin ini, Amerika Serikat secara sepihak memberikan hak kepada dirinya untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, khususnya melalui tindakan militer unilateral, untuk menghancurkan apa yang dipersepsikannya sebagai kemungkinan ancaman terror terhadap kepentingan Amerika Serikat kapanpun dan dimanapun.

Di sisi lain, kebijakan *preventive* merupakan strategi menghilangkan kondisi-kondisi yang dapat mendukung kemunculan, perkembangan dan pertumbuhan organisasi terorisme. Kebijakan ini mencakup antara lain peningkatan pertahanan keamanan, penegakan hukum dan demokrasi, mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Selanjutnya, sejalan dengan doktri *preemptive* dan *preventive*, Amerika Serikat kini tampil sebagai negara adidaya tunggal yang meyakini bahwa pendekatan militer merupakan pendekatan terbaik yang dapat dilakukan dalam usaha memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingan keamanannya.²⁸

Penekanan kepada pendekatan militer itu terlihat juga melalui peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan dalam pemerintah Amerika Serikat sejak tragedi 11 September, peran pentagon yang dominan dalam menjalani kebijakan luar negeri, dan peningkatan bantuan militer kepada pemerintah di negara-negara yang diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi mitra dalam perang melawan terorisme, seperti Pakistan, Filipina, Indonesia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

²⁸ Rizal Sukma. "Kemanan Internasional Pasca 11 September, Hegemoni AS dan Implikasi Regional" Hal 5

Diselaraskan dengan dua platform kebijakan tersebut, kebijakan terhadap isu terorisme, Amerika Serikat secara konseptual meliputi empat pilar utama, yaitu : *defeating, denying, dimishing, dan defending*. Empat pilar tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. *Defeating* : bersama dengan sekutu-sekutunya, Amerika Serikat mengalahkan teroris dengan cara menyerang markas, pemimpin, dan seluruh infrastruktur gerakan mereka.
2. *Denying* : menentang dan menolak segala bentuk bantuan, dukungan serta perlindungan terhadap teroris. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga agar negara lain menghalangi segala usaha-usaha tersebut dalam wilayah kekuasaan mereka.
3. *Diminishing* : memperbaiki kondisi yang mendukung munculnya terorisme dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan politik, penciptaan ekonomi berbasis pasar, dan penegakan hukum
4. *Defending* : melindungi warga negara dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di dalam dan di luar negeri termasuk perlindungan infrastruktur *cyber*.²⁹

Empat pilar tersebut dikombinasikan dengan penggunaan sarana-sarana strategis Amerika Serikat berupa pertama, *Pendekatan Diplomasi* yaitu penggunaan diplomasi untuk membantu menciptakan koalisi global anti-terorisme merupakan komponen utama dalam kebijakan anti-terorisme Pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini, media masa juga menjadi sarana diplomasi yang kuat

²⁹ Raphael Perl. "US Anti-Terror Strategy and the 9/11 Commission Report". CRS Report for Congress 2004 hal 3

dalam menghadapi teroris dengan cara membangun ketertarikan dan mempengaruhi cara berfikir masyarakat.

Yang kedua, *Sanksi Ekonomi*. Jika sebelumnya sanksi ekonomi hanya diberikan kepada negara yang aktif mendukung dan mensponsori terorisme internasional, maka pada saat sekarang, sanksi dapat juga dikenakan pada saat asset-aset yang dikelola langsung kelompok terorisme, seperti pembekuan asset pribadi para tersangka terorisme.

Yang ketiga *Bantuan Ekonomi*. Bantuan Ekonomi merupakan bantuan usaha mengubah kondisi sosial ekonomi yang mendukung berkembangnya terorisme. Dengan pengurangan angka kemiskinan diyakini akan dapat mengubah pola hidup dan penekanan potensi-potensi terorisme.

Yang keempat *Aksi Tertutup* yaitu tindakan yang meliputi pengumpulan data intelejen, penyeragaman kelompok teroris, dan operasi militer bersifat rahasia. Sebagian besar tindakan ini ditujukan untuk mengawasi dan mencari tahu tujuan, kemampuan atau bahkan rencana strategis organisasi teroris.

1. *Penawaran hadiah untuk informasi yan berguna* : model ini dipakai karena terbukti berhasil dalam menangani penyelundupan obat-obatan terlarang dan pemberontakan di beberapa negara.
2. *Kerjasama dalam penegakan hukum dan ekstradisi* : kerjasama internasional di bidang penegakan hukum, pengawasan, dan kegiatan intelejen termasuk dalam bagian esensial dari kebijakan anti-terorisme pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan ekstradisi dalam hal ini termasuk yang krusial mengingat

banyak negara yang membatasi perjanjian ekstradisi khususnya yang sifatnya politis.

3. *Kekuatan militer* : penggunaan kekuatan militer bukanlah hal yang menjadi kendala bagi negara dengan kekuatan militer bukanlah hal yang menjadi kendala bagi negara dengan kekuatan militer seperti Amerika Serikat. Untuk penanganan terorisme di tingkatan domestic maupun internasional, Amerika Serikat di dukung oleh kepemilikan senjata canggih dan mutakhir.
4. *Konvensi Internasional* : Amerika Serikat bersama dengan komunitas internasional telah dan sedang mengembangkan konvensi-konvensi tersebut mengajak keterlibatan dalam sebuah misi menghukum para pelaku terror atau mengekstradisi mereka ke negara tempat aksi berlangsung.³⁰

Sarana yang dimiliki Amerika Serikat dalam kampanye terhadap isu terorisme kemudian dimasukkan dalam kebijakan perang melawan terorisme untuk skala internasional dan menghasilkan strategi-strategi pengamanan bagi kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Dari strategi-strategi tersebut, beberapa diantaranya memiliki dampak luas dalam konstalasi politik internasional. Strategi yang dimaksud adalah penolakan terhadap segala bentuk bantuan kepada terorisme. Dalam hal ini targetnya adalah menjaga agar negara lain, mengambil langkah yang sama dengan Amerika Serikat dalam wilayah kekuasaan mereka.

D. Hubungan Amerika Serikat – Indonesia

³⁰ CRS Issue Brief for Congress : Terrorism, the future, and US Foreign Policy.”
<http://www.iwar.org>. Diakses tanggal 15 september 2014

Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia merupakan hubungan yang tidak stabil. Suatu ketika Indonesia bisa sangat dekat dengan Amerika Serikat dan di lain waktu hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi renggang. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dimulai dari jaman Presiden Soekarno, pada waktu itu Soekarno sangat menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam permasalahan politik dalam negeri Indonesia. Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Soekarno juga memiliki reservasi tersendiri tentang Indonesia.

Soekarno yang menerapkan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) tidak sejalan dengan pola Pemerintahan Amerika Serikat yang mengutamakan demokrasi dan liberalisasi. Soekarno mengimbangi dengan membuat hubungan kedekatan dengan Uni-Sovyet. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat mulai menanam pengaruhnya di Indonesia untuk menggulingkan Soekarno. Agen-agen CIA Amerika Serikat menyusup ke dalam kelompok pemberontak di Indonesia untuk mengacaukan pemerintahan Soekarno. Hingga puncaknya terjadi peristiwa G30S/PKI yang merupakan upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan Presiden Soekarno.

Pasca tumbanganya rezim Soekarno yang digantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia membawa angin segar dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Soeharto merupakan Jendral-TNI yang pro-kebijakan Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, yang terpenting adalah negara-negara di dunia tidak menganut paham komunisme, sehingga keterbukaan Presiden Soeharto akan demokrasi dan liberalisasi disambut baik oleh Amerika Serikat. Soeharto

bersikeras akan penyerangan terhadap Timor-Timur karena di wilayah tersebut terdapat partai Fretlin yang berkiblat pada aliran Komunisme.

Dengan alasan demi mencegah penyebaran komunisme di wilayah tersebut, Soeharto meminta restu Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Timor-Timur. Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Ford memberikan restu kepada Indonesia untuk menginvasi wilayah Timor-Timur. Operasi Saroja dimulai pada tahun 1976 dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh komunisme di wilayah tersebut. Invasi Indonesia didukung penuh oleh Amerika Serikat yang memberikan bantuan alutsista demi kelancaran operasi Saroja. Bantuan dari Amerika Serikat terus berdatangan dalam berbagai bentuk mulai dari penjualan alutsista hingga pelatihan dan pendidikan militer. Cikal bakal penjatuhan embargo senjata oleh Amerika Serikat berawal dari keputusan Presiden Soeharto untuk menyerang wilayah Timor-Timur yang dulunya merupakan wilayah jajahan Portugis.

Runtuhnya Uni Soviet sebagai lawan dari kekuatan Super Power mengubah kancah geopolitik Internasional Amerika Serikat dan dunia mulai mempertanyakan penyerangan Indonesia terhadap Timor-Timur. Peristiwa penembakan di Gereja Santa Cruz dan *Balibo five* menjadi hambatan bagi keberlangsungan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer. Amerika Serikat menghentikan program pelatihan militer (IMET) terhadap perwira Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan Presiden Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden Habibie. Dalam masa jabatan Presiden Habibie yang singkat (selama satu tahun), pemerintah Indonesia atas desakan asing memberikan referendum kepada rakyat Timor-Timur untuk menentukan masa depan negaranya. Hasil dari referendum tersebut adalah merdekanya Timor-Timur dari Indonesia. Setelah referendum yang dimenangkan oleh rakyat Timor-Timur, Kopasus dan kelompok Militan yang pro Indonesia melancarkan aksi-aksi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat di Timor-Timur. Akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh Kopasus dan kelompok *para military* Timor-Timur, terjadi exodus besaran-besaran warga Timor-Timur yang menghindari konflik di negaranya. Banyak masyarakat Timor-Timur yang menjadi korban akibat tindakan dari Kopasus dan kelompok *para military* Timor-Timur pro Indonesia.

Akibat dari perbuatan Kopasus, Amerika Serikat menjatuhkan embargo senjata terhadap Indonesia. Semasa embargo senjata berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan perawatan untuk operasional kendaraan tempur, baik angkatan Darat Laut dan Udara. Angkatan Udaralah yang paling parah terpengaruhi oleh kebijakan embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pesawat angkut dan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia terpaksa dihancurkan. Tidak lama setelah Indonesia di embargo senjata oleh Amerika Serikat, Indonesia mengalami masalah konflik etnis di kepulauan Maluku. TNI mengalami kesulitan dalam bidang logistik akibat diberlakukannya embargo senjata oleh Amerika Serikat.

Kemudian pasca Reformasi Amerika mulai memperbaiki hubungan dengan Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Amerika memperbaiki hubungan tersebut adalah:

1. Peristiwa Bom Bali dan Terorisme

Peristiwa bom Bali I dan bom Bali II merupakan awal mula perbaikan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer. Presiden Bush ketika bertemu dengan Presiden Megawati di Bali mengungkapkan keinginannya untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan tindak terorisme di Indonesia. Bencana Tsunami di Aceh juga membantu untuk memperbaiki hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Usaha untuk memulihkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dilakukan tidak hanya oleh pihak Indonesia, tetapi oleh pihak internal Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan asing terus melobi pemerintah Amerika Serikat agar melanjutkan kembali hubungan militernya dengan Indonesia. *Lockheed Martin* dan *Boeing* yang sudah memiliki kontrak kerja dengan Indonesia terpaksa menghentikan sementara produksi alutsista dikarenakan kebijakan embargo senjata.

2) Perubahan Indonesia kearah Demokrasi

Pada bulan November tahun 2005 Amerika Serikat secara resmi mencabut embargo senjata terhadap Indonesia. Alasan Amerika Serikat mencabut embargo senjata terhadap Indonesia adalah Amerika Serikat merasa bahwa dalam kurung

waktu embargo senjata dijatuhkan, Indonesia telah banyak mengalami perubahan yang baik. Indonesia telah menjadi Negara yang lebih demokratis, hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya di selenggarakan pemilu tahun 2004 secara jujur dan adil. Selain perubahan politis yang dialami oleh Indonesia, Amerika Serikat juga merasa bahwa Indonesia merupakan Negara yang menjadi sasaran serangan teroris. Peristiwa Bom Bali satu dan dua, serta serangkaian aksi-aksi terorisme yang terjadi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mitra kerja global dalam menangani terorisme di Asia Tenggara.

3) Kerjasama untuk kemanusiaan

Bencana Tsunami Aceh yang terjadi pada penghujung tahun 2004 juga merupakan sebuah berkah bagi hubungan bilateral antar kedua Negara. Atas dasar kemanusiaan Amerika Serikat mencabut sebagian (*partially lifting*) embargo senjatanya terhadap Indonesia Amerika Serikat membuka kembali jalur FMS (*Foreign Military Sales*) untuk suku cadang pesawat *C-130 Hercules* untuk membantu upaya penanggulangan bencana. Amerika Serikat juga memberikan bantuan sumber daya manusia yang berasal dari *U.S Marines* untuk membantu TNI dalam hal penanggulangan bencana di Aceh.

4) Adanya Cina sebagai the *New Emerging Power*

Naiknya Cina sebagai salah satu *New Emerging Power* di kawasan Asia Pasifik menjadi sebuah kekhawatiran Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa perlu mencari sekutu dalam menanggapi permasalahan di era baru ini. Indonesia

yang memiliki prioritas dan orientasi politik yang sama dan memiliki kebijakan politik bebas aktif (sehingga tidak memihak blok atau negara manapun) merupakan sasaran tepat bagi Amerika Serikat dijadikan mitra kerja.

Dari sisi lain sebenarnya terlihat bahwa kedekatan kembali Amerika Serikat terhadap Indonesia setelah diangkatnya embargo senjata menunjukkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kebijakan *security cooperation* yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat yang berupa kebijakan politik serta strategi pertahanan dan keamanannya. Selain itu, kebijakan *security cooperation* juga digunakan untuk melindungi asset-asset Amerika Serikat yang terdapat di Indonesia seperti FreePort McMoran di Papua dan Exxon Mobile di Aceh.